

Implementasi Peran Praktisi Humas dalam Mengkomunikasikan Kinerja Anggota Fraksi PKS DPR RI Jelang Pemilu 2024

Rahmadi Tri Yoga¹, Yugih Setyanto^{2*}

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: rahmadi.915200230@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
Email: yugihs@fikom.untar.ac.id

Masuk tanggal : 10-10-2023, revisi tanggal : 15-11-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal : 13-01-2024

Abstract

In carrying out its vision and mission, the The Prosperous Justice Party (PKS) faction in the Indonesian Parliament (DPR RI) necessitates the involvement of public relations to effectively communicate the overall performance of its members to the public. This study aims to explore the role of public relations of the PKS DPR RI faction in socializing the performance of PKS faction members ahead of the 2024 elections. In this study, the author used descriptive qualitative methods and data collection techniques through interviews, non-participant observation, and recording. Based on the findings, the public relations of the PKS DPR RI faction plays a role in helping to communicate all the work of the PKS DPR RI faction in the form of activities, policies, and responses to issues that occur in the public sphere to build public perceptions in a more responsible way, which is assisted by a public relations work system that is integrated with all media expert devices, with outputs in the form of public relations products in the form of releases, photos and videos published to all official faction channels, faction members, and media crew. Technically, ahead of the 2024 election, the Faction's public relations campaign the performance of Faction members by making a recap of the performance of the last four years, which is presented in the form of public relations products, which will then be distributed to all internal and external parties of the Faction, including the media crew. The four indicators of the role of public relations practitioners applied by the public relations of the PKS DPR RI Faction include expert prescriber and communication facility The public relations practitioners of the PKS DPR RI Faction apply four indicators to define their role, which encompasses being an expert prescriber, communication facilitator, problem-solving process facilitator, and communication technician, problem-solving process facilitator, and communication technician.

Keywords: 2024 elections, PKS faction, role of PR practitioners

Abstrak

Dalam menjalankan visi dan misinya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI membutuhkan peran humas untuk mengkomunikasikan seluruh kinerja anggota fraksi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Fraksi PKS DPR RI dalam mensosialisasikan kinerja anggota Fraksi PKS menjelang Pemilu 2024. Dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, metode deskriptif kualitatif, observasi non-partisipan dan dokumentasi. Berdasarkan temuan, humas Fraksi PKS DPR RI berperan dalam membantu mengkomunikasikan seluruh kerja Fraksi PKS DPR RI berbentuk kegiatan, kebijakan dan menanggapi isu yang terjadi di ruang publik, untuk membangun persepsi publik dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Humas dibantu dengan sistem kerja kehumasan yang terintegrasi dengan seluruh perangkat tenaga ahli media, dengan luaran berbentuk produk humas berupa rilis, foto dan video yang dipublikasikan ke

seluruh kanal resmi fraksi, anggota fraksi, dan awak media. Secara teknis, jelang pemilu 2024, humas fraksi melakukan kampanye kinerja anggota fraksi dengan membuat rekapitulasi kinerja empat tahun terakhir, yang disajikan dalam bentuk produk humas yang disalurkan ke seluruh pihak internal dan eksternal fraksi. Adapun empat indikator peran praktisi humas yang diterapkan oleh humas Fraksi PKS DPR RI diantaranya penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi.

Kata Kunci: fraksi PKS, pemilu 2024, peran praktisi humas

1. Pendahuluan

Menjelang pesta demokrasi 2024, seluruh komponen partai politik di Indonesia berlomba-lomba memunculkan diri untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat akan keberadaan mereka di dunia perpolitikan Indonesia, termasuk fraksi di dalamnya. Merujuk pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik sesuai dengan hasil pemilihan umum (Cahyawati et al., 2021). Berbagai cara pun dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengenali setiap partai politik berdasarkan identitas masing-masing. Untuk mengkomunikasikan hal tersebut, maka dibutuhkan peran humas yang memiliki kapabilitas dalam melakukan pengelolaan dan penyebaran informasi seluas-luasnya.

Secara harfiah, istilah humas berasal dari dua suku kata yaitu “masyarakat” dan “hubungan”. Masyarakat secara sederhana adalah sekelompok individu-individu yang membentuk kelompok besar. Sementara itu, dalam konteks humas, pengertian masyarakat secara lebih rinci mengacu pada sekelompok individu yang menjadi fokus kegiatan kehumasan. Ini berarti kelompok tersebut harus selalu dihubungi, dilibatkan, bahkan diperhatikan dalam rangka menjalankan fungsi Humas. Istilah "hubungan," jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengacu pada korelasi yang melibatkan berbagai hubungan.

Menurut John E. Maiston, “*public relations is planned, persuasive communication designed to influence significant public*”. Marson mendefinisikan humas merupakan sebuah proses terencana, yang bersifat membujuk dan dirancang untuk mempengaruhi khalayak yang dianggap signifikan (Roberto et al., 2018). Sedangkan Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya *Effective Public Relations* edisi kesembilan mengartikan humas sebagai suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjalin dan memelihara hubungan yang baik dan bermanfaat antara suatu organisasi dengan hubungan publiknya. Hubungan-hubungan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi (Cutlip et al., 2009). Humas di sisi lain adalah sebuah konsep yang mencakup semua komunikasi terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara organisasi dengan seluruh khalayaknya. Fungsi humas ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersumber dari saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat.

Ruang lingkup kehumasan terbagi dalam dua bagian, yaitu humas internal dan humas eksternal. Humas internal berfungsi sebagai pen jembatan informasi untuk menjalin hubungan dengan khalayak internal organisasi seperti pimpinan, karyawan dan komponen internal lainnya, dengan maksud agar persepsi dan reputasi organisasi tetap positif di pandangan khalayak internal. Sedangkan humas eksternal berfungsi sebagai penghubung organisasi dengan khalayak luar, seperti media, komunitas, masyarakat, konsumen, simpatisan, para pemilih dan lain sebagainya, dengan tujuan agar kesepahaman antara organisasi dengan khalayak luar dapat terbangun dengan

positif, sehingga berimplikasi baik pada reputasi organisasi di mata khalayak eksternal. Jelang pemilu serentak 2024 inilah, humas eksternal berperan aktif dalam melakukan tugasnya untuk mengelola dan menyebarkan informasi, demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan tiap-tiap partai politik.

Menurut Ruslan (2010: 23), ruang lingkup tugas humas mencakupi sejumlah aktivitas, antara lain:

- 1) Membangun hubungan ke dalam (publik internal), yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan citra negatif di ranah publik sebelum melaksanakan kebijakan organisasi, dengan bekerjasama dengan publik di dalam organisasi.
- 2) Menjalin hubungan ke luar (publik eksternal), yakni kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sikap dan citra positif dari masyarakat terhadap organisasi yang diwakili.

Selain ruang lingkup kerja humas, peran praktisi humas juga penting untuk dipahami. Adapun peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom (dalam Ruslan, 2010: 20) meliputi:

- 1) Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)
Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan cakap dapat membantu menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakat dan kehumasan.
- 2) Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*)
Praktisi humas berperan sebagai komunikator dan moderator dalam membantu manajemen untuk mendengarkan kebutuhan dan harapan dari publiknya.
- 3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)
Dalam hal ini praktisi humas berperan dalam membantu mencari solusi permasalahan. Selain itu, humas juga merupakan bagian dari tim manajemen yang membantu para pemimpin organisasi, baik sebagai konsultan maupun sebagai pemimpin, untuk bertindak dan melaksanakan keputusan secara rasional dan profesional, serta mengatasi permasalahan atau krisis yang mereka hadapi.
- 4) Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)
Peran teknisi komunikasi menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in residence* yang hanya memberikan layanan komunikasi teknis atau dikenal dengan *communication in organization*.

Poin-poin tersebut perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang humas, agar dapat menunjang pekerjaan yang dilakukan secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengamatan tentang implementasi peran praktisi humas dalam mengkomunikasikan kinerja anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, khususnya menjelang Pemilu 2024.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk mendeskripsikan peran praktisi humas dalam mengkomunikasikan kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, khususnya jelang pemilu 2024. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln (dalam Muhtadi, 2020) penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mengaplikasikan metode ilmiah dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode penelitian yang tersedia untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Baxter dan Jack (dalam Fadli, 2021), menjelaskan bahwa studi kasus (*case study*) merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap subjek penelitian, seperti program, peristiwa, aktivitas, dan lainnya. Tujuan dari studi kasus ini adalah memperoleh pengetahuan atau informasi yang mendalam terkait subjek tersebut. Fenomena yang dipilih dalam studi kasus disebut sebagai kasus, yang berarti situasi aktual atau peristiwa kehidupan nyata yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah berlalu.

Sumber data merujuk pada segala informasi yang dapat memberikan data terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan. Data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, (2017: 225), data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau lokasi di mana objek penelitian berada. Dalam hal ini, peneliti menggunakan hasil wawancara dengan informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Dalam konteks penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui studi literatur. Selanjutnya, untuk memperoleh data, peneliti mengimplementasikan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti memilih tiga informan untuk diwawancarai secara mendalam dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Tiga informan yang dipilih yaitu: Heryadi Silvianto, S.Sos., M.Si. yang merupakan Kepala Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI; Eko Febrianto, S.Sos., M.I.Kom. selaku *Media Relations* Humas Fraksi PKS DPR RI; serta Muhammad Rofik Nawawi, S.Pd. selaku *Editor* dan *Content Creator* Humas Fraksi PKS DPR RI. Tiga informan ini dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi untuk dijadikan sumber terpercaya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah yang ada pada penelitian ini secara kualitatif, sehingga penulis dapat menemukan jawaban tentang implementasi peran praktisi humas seperti apa yang dijalankan oleh Humas Fraksi PKS DPR RI dalam mengkomunikasikan kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, khususnya jelang pemilu 2024.

3. Hasil Temuan dan Diskusi

Fraksi PKS DPR RI merupakan salah satu dari sembilan fraksi yang aktif di parlemen Indonesia selama periode 2019-2024. Fraksi ini terdiri dari 50 anggota DPR RI yang mengusung pandangan politik yang sejalan dengan visi dan misi partai pengusungnya yaitu PKS. Fraksi PKS di DPR RI menjadi representasi resmi dari Partai Keadilan Sejahtera dalam arena parlemen Indonesia (Humas Fraksi PKS, 2016). Dalam menjalankan visi dan misinya, Fraksi PKS DPR RI membutuhkan peran humas Fraksi, untuk mengkomunikasikan kepada seluruh khalayaknya (yaitu masyarakat dan para pemilih PKS di pemilu 2019 lalu) terkait sikap, pandangan, serta putusan politik Fraksi PKS, di parlemen Indonesia.

Untuk mengetahui peran humas Fraksi PKS DPR RI dalam membantu kerja Fraksi, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Koordinator Humas Fraksi yaitu Heryadi Silvianto, S.Sos., M.Si. Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa Humas Fraksi PKS DPR RI memiliki peran membantu mengkomunikasikan

kepada khalayak seluruh kerja Fraksi PKS DPR RI yang berbentuk kegiatan, kebijakan dan respon isu yang terjadi di ruang publik, yang bertujuan untuk membangun persepsi khalayak dengan cara yang lebih bertanggung jawab.

Ketika peneliti ingin mengetahui peran seperti apa yang dijalankan Humas Fraksi PKS DPR RI untuk mensosialisasikan kinerja anggota Fraksi PKS, peneliti melakukan wawancara bersama tiga informan sekaligus diantaranya, Heryadi Silvianto, S.Sos., M.Si. selaku kepala koordinator humas Fraksi PKS DPR RI, Eko Febrianto, S.Sos., M.I.Kom. selaku *media relations* humas Fraksi PKS DPR RI serta Muhammad Rofik Nawawi, S.Pd. selaku *editor* dan *content creator* humas Fraksi PKS DPR RI.

Berdasarkan paparan Heryadi dan Eko, untuk mengkoordinir seluruh kegiatan anggota Fraksi PKS DPR RI yang berada di kompleks perkantoran parlemen maupun diluar, humas Fraksi PKS DPR RI membangun sebuah sistem kerja untuk seluruh perangkat tenaga ahli (TA) yang dikoordinasikan di awal periode, dengan memberikan pelatihan kepada seluruh TA media tiap anggota Fraksi PKS tentang bagaimana cara memproduksi produk humas, yang kemudian akan disempurnakan dan divalidasi oleh humas Fraksi, hingga nantinya dinilai layak untuk dipublikasikan. Sistem yang dibangun memberikan kemudahan kerja bagi humas Fraksi PKS DPR RI dalam mengkoordinir dan meliputi seluruh kegiatan anggota Fraksi PKS, karena mekanisme pekerjaan menjadi lebih teratur dan terstruktur. Heryadi juga sempat menyinggung bahwa humas Fraksi PKS DPR RI berada pada *top management level* sehingga membuat humas Fraksi PKS DPR RI ikut andil dalam semua pengambilan kebijakan yang ada di ruang lingkup Fraksi PKS.

Untuk mensosialisasikan seluruh kinerja anggota Fraksi PKS, Heryadi menjelaskan bahwa humas Fraksi PKS DPR RI memilih luaran berbentuk produk humas yang diproduksi sendiri, yang selanjutnya akan disebarakan melalui media sosial, *media relations*, dan media *non-media* sosial dan *non-media relations* seperti berkomunikasi dengan kampus, berkomunikasi dengan khalayak, berkomunikasi dengan *influencer*, dll.

Pada wawancara itu, Heryadi juga mengatakan bahwa pertahanan terbaik pada saat-saat situasi krisis adalah kemampuan khalayak internal maupun eksternal dalam memberikan informasi yang cukup dan sesuai dengan yang diharapkan pada khalayak. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Humas Fraksi PKS DPR RI membangun ekosistem komunikasi yang sudah terintegrasi sedari awal, dengan memberikan informasi-informasi yang sesuai ke banyak pihak agar mereka dapat terpapar informasi yang berasal dari Humas Fraksi PKS DPR RI, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi bagian dari orang-orang yang membantu Fraksi PKS untuk menjelaskan pada pihak lain berdasarkan sudut pandang yang sama dengan humas Fraksi PKS DPR RI.

Dikarenakan adanya perpindahan cara khalayak dalam mengkonsumsi informasi ke media sosial, maka Humas Fraksi PKS DPR RI memilih media sosial sebagai salah satu kanal untuk melakukan penyebaran informasi yang mereka gunakan untuk mensosialisasikan kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, khususnya untuk kalangan generasi muda. Pada wawancara penelitian ini, Rofik menjelaskan ketentuan dasar yang menjadi acuan dalam pembuatan konten terkait kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, diantaranya harus memastikan bahwa konten yang diproduksi memiliki nilai informatif atau menghibur atau mengandung pesan-pesan, tidak berbau sara, tidak boleh menyerang seseorang ataupun kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan dari segi teknis, kualitas gambar dan proses pengambilan harus baik, lalu harus memperhatikan pemilihan tata letak yang proporsional, *font* harus sesuai dengan

kebutuhan konten dan pemilihan musik harus yang tidak terkena *copyright*. Heryadi menjelaskan bahwa *deadline* perlu untuk ditetapkan dalam publikasian informasi agar humas Fraksi PKS DPR RI dapat memberikan informasi yang *update, realtime*, sehingga tidak kehilangan momen dan kesempatan yang lebih besar dalam mempublikasikan informasi yang eksklusif kepada khalayak terkait kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI.

Jelang pemilu 2024 mendatang, humas Fraksi PKS DPR RI berperan dalam melakukan kampanye kinerja Fraksi sehingga humas Fraksi akan giat mensosialisasikan dan mengkampanyekan seluruh kinerja Fraksi PKS selama empat tahun terakhir, dengan membuat rekap kerja para anggota yang disajikan dalam bentuk produk humas, kemudian akan disebar ke seluruh pihak baik internal maupun eksternal, sehingga diharapkan gaungan informasi yang disampaikan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pemilih di pemilu 2024 mendatang.

Berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan kesinambungan antara konsep yang penulis pilih dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun konsep ilmu komunikasi mengenai peran praktisi humas yang penulis gunakan adalah konsep peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom (dalam Ruslan, 2010) yang terdiri dari empat kategori, diantaranya:

1) Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)

Praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publik (*public relations*). Menurut Broom (dalam Ruslan, 2010) indikator yang menunjukkan bahwa seseorang menjalankan perannya sebagai *expert prescriber*, diantaranya:

- a. Merumuskan kebijakan komunikasi.
- b. Menelaah permasalahan *public relations*.
- c. Merencanakan dan merekomendasikan tindakan yang perlu dilakukan.
- d. Bertanggung jawab atas segala keberhasilan maupun kegagalan.
- e. Dinilai oleh orang lain sebagai pakar.
- f. Dipandang oleh anggota organisasi sebagai seseorang yang patut dipercaya.

Humas Fraksi PKS DPR RI mengimplementasikan peran praktisi humas kategori *expert prescriber* ini dalam ruang lingkup kerja mereka, diantaranya humas Fraksi PKS DPR RI diikutsertakan pada seluruh proses pengambilan kebijakan yang ada di Fraksi PKS DPR RI. Selanjutnya keberhasilan humas Fraksi PKS DPR RI dalam membangun sistem kerja humas khususnya dalam hal memproduksi produk humas, pada akhirnya memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan dengan teratur dan terstruktur, yang terintegrasi pada seluruh TA media dari tiap-tiap anggota Fraksi, membuat orang-orang di internal maupun eksternal Fraksi menjadi percaya akan kiprah dan kinerja dari humas Fraksi PKS DPR RI dalam membantu kerja Fraksi PKS, khususnya dalam hal mensosialisasikan kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI jelang pemilu 2024.

2) Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Dalam hal ini, praktisi humas berperan sebagai komunikator atau moderator, membantu manajemen dalam mendengarkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Disisi lain, ia juga diharapkan mampu menjelaskan kepada publik mengenai aspirasi, kebijakan, dan harapan organisasi. Broom (dalam Ruslan, 2010) berpendapat bahwa indikator yang menunjukkan peran praktisi humas sebagai fasilitator komunikasi, antara lain:

- a. Memastikan manajemen selalu mempunyai informasi terkini.

- b. Melaporkan secara berkala hasil survei opini publik.
- c. Ciptakan peluang bagi manajemen untuk selalu mendengarkan apa yang dikatakan.
- d. Memastikan bahwa setiap anggota organisasi mempunyai akses terhadap informasi yang diperlukan.
- e. Melakukan tinjauan komunikasi.
- f. Menjadi perwakilan organisasi di setiap acara dan pertemuan.

Dalam hal ini, jelas bahwa humas Fraksi melakukan perannya untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kerja anggota Fraksi PKS DPR RI kepada masyarakat, yang disuguhkan dalam bentuk produk humas berupa rilis, foto dan video. Selain itu, staf *research specialist* humas Fraksi PKS DPR RI, setiap pagi juga melakukan *feeding* isu kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI dan TA masing-masing anggota, terkait isu terkini dan memiliki relevansi dengan pembahasan di masing-masing komisi. hal ini dilakukan oleh humas Fraksi PKS DPR RI dengan tujuan untuk memberikan pembaruan informasi terkini, untuk tiap-tiap anggota Fraksi PKS DPR RI.

3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Humas adalah bagian yang tak terpisahkan dari tim manajemen, dengan tujuan untuk mendukung pimpinan organisasi sebagai penasihat (*adviser*), yang memungkinkan pemimpin organisasi untuk mengambil tindakan dan mengeksekusi keputusan dalam penanganan masalah atau krisis dengan pendekatan yang rasional dan profesional. Broom (dalam Ruslan, 2010) berpendapat bahwa ada beberapa indikator yang mencerminkan peran fasilitator proses pemecahan masalah, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan perencanaan *public relations* yang sistematis.
- b. Bekerjasama dengan manajemen untuk meningkatkan keterampilan.
- c. Meningkatkan keterlibatan manajemen.
- d. Melibatkan manajemen secara aktif.
- e. Bertindak sebagai katalis.
- f. Menghasilkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah.

Humas Fraksi PKS DPR RI membangun ekosistem komunikasi yang sudah terintegrasi sedari awal, yang melibatkan banyak pihak seperti media, para TA dari tiap-tiap anggota hingga media sosial, yang diharapkan bisa menjadi bagian dari pihak-pihak yang akan memberikan informasi dari sudut pandang yang sama dengan Fraksi PKS, pada situasi-situasi krisis yang sedang dihadapi. Hal ini dilakukan oleh humas Fraksi PKS DPR RI karena mereka percaya bahwa pertahanan terbaik pada saat krisis adalah kemampuan khalayak internal maupun eksternal yang sudah terpapar informasi, menyampaikan informasi yang cukup dan sesuai dengan yang diharapkan, kepada khalayak berdasarkan sudut pandang yang sama.

4) Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Peran teknisi komunikasi memungkinkan praktisi humas untuk bertindak sebagai *journalist in residence* yang berspesialisasi dalam layanan komunikasi teknis, atau lebih umum dikenal dengan istilah *communication in organization*. Sistem komunikasi dalam suatu organisasi berbeda-beda pada setiap departemen atau level, termasuk perbedaan aspek teknis komunikasi serta proses komunikasi dan media yang digunakan antara level pimpinan dan bawahan. Sama halnya perbedaan tersebut terlihat dalam aliran dan media komunikasi di antara rekan sesama tingkat, seperti komunikasi antar karyawan di satu divisi dengan karyawan di divisi yang berbeda (*employee relations media model*). Broom menyatakan dalam (Ruslan, 2010) bahwa

ada beberapa indikator yang mengungkapkan peran seorang teknisi komunikasi, antara lain:

- a. Membuat materi-materi *public relations*.
- b. Mengedit atau menulis ulang untuk pemeriksaan tata bahasa.
- c. Bertanggung jawab pada aspek teknis.
- d. Memproduksi brosur dan pamphlet.
- e. Menyelenggarakan kegiatan fotografi dan desain grafis.
- f. Menjaga hubungan dengan media dan menerbitkan siaran pers.

Humas Fraksi PKS DPR RI melakukan produksi produk humas sendiri yang diantaranya berbentuk rilis, foto dan video terkait kegiatan dan kerja anggota Fraksi PKS DPR RI. Untuk kegiatan para anggota Fraksi PKS DPR RI yang berada di luar kawasan kompleks perkantoran parlemen seperti kunjungan dapil dan lain-lain, humas Fraksi PKS DPR RI juga akan membantu untuk melakukan pengecekan, merevisi dan memvalidasi produk humas yang telah dikerjakan para TA media dari tiap-tiap anggota Fraksi, sehingga dinilai layak untuk dipublikasikan. Terakhir, *media relations* humas Fraksi PKS DPR RI juga memelihara hubungan dengan para media dengan melakukan kumpul bersama, mencurahkan perhatian bagi para media, yang selanjutnya menggabungkan mereka di dalam satu grup sehingga memberikan kesempatan bagi humas Fraksi PKS DPR RI untuk menyebarkan informasi berbentuk *press release* terkait Fraksi PKS di dalamnya. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan seluruh kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI kepada masyarakat, khususnya jelang pemilu serentak 2024 mendatang.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai implementasi peran praktisi humas dalam mengkomunikasikan kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI jelang Pemilu 2024, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

- 1) Dalam membantu kerja Fraksi PKS DPR RI, humas fraksi memiliki peran dalam hal membantu mengkomunikasikan kepada khalayak tentang seluruh kiprah dan kerja Fraksi PKS DPR RI yang berbentuk kegiatan, kebijakan dan respon isu yang terjadi di ruang publik, untuk membangun persepsi publik dengan cara yang lebih bertanggung jawab.
- 2) Humas Fraksi PKS DPR RI berperan dalam mensosialisasikan seluruh kinerja anggota Fraksi PKS DPR RI, baik di lingkungan kompleks parlemen maupun yang di luar kawasan, dengan memproduksi produk humas sendiri, berbentuk rilis yang akan dipublikasikan di *website* resmi Fraksi dan disalurkan kepada para wartawan, lalu foto dan video yang akan dipublikasikan ke seluruh kanal media sosial resmi Fraksi PKS DPR RI. Lalu untuk memudahkan peliputan di lapangan, humas Fraksi PKS DPR RI menerapkan sistem kerja humas yang sudah di bangun sejak awal periode, seperti memberikan pelatihan pada seluruh tenaga ahli media anggota Fraksi PKS DPR RI tentang bagaimana cara memproduksi produk humas sendiri, yang kemudian akan dilakukan pengecekan, revisi dan validasi tentang kelayakan produk humas yang selanjutnya akan dipublikasikan ke seluruh kanal resmi fraksi dan kanal pribadi tiap anggota.
- 3) Jelang Pemilu 2024, Humas Fraksi PKS DPR RI berperan dalam melakukan kampanye kinerja fraksi maupun anggota selama empat tahun terakhir, yang disajikan dalam bentuk produk humas seperti rilis, foto dan video, yang

kemudian akan disebarakan ke seluruh pihak internal dan pihak eksternal Fraksi PKS DPR RI.

- 4) Penulis menemukan adanya kesamaan atau kesinambungan antara konsep yang penulis pilih yaitu konsep ilmu komunikasi mengenai peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom, dengan metode penelitian yang penulis gunakan. Humas Fraksi PKS DPR RI menerapkan empat kategori peran praktisi humas menurut Dozier dan Broom, diantaranya ikut serta dalam seluruh pengambilan kebijakan, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kerja anggota Fraksi PKS DPR RI dalam bentuk produk humas, membangun ekosistem komunikasi sebagai solusi manajemen krisis, dan menjadi teknisi produksi seluruh produk humas yang dihasilkan.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, narasumber, dan seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Cahyawati, D. P., Hoesein, Z. A., & Widadi, E. (2021). Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan DPR. *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69>
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2009). *Effective Public Relations* (9th ed., Vol. 3). Kencana.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. file:///Users/rahmaditriyoga/Downloads/38075-110174-1-PB.pdf
- Humas Fraksi PKS. (2016, May 16). *Profil Dan Visi-Misi Fraksi PKS DPR RI*. Website Resmi Fraksi PKS DPR RI . <https://fraksi.pks.id/visi-dan-misi-fraksi/>
- Muhtadi, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 20(2), 188–197. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/view/821>
- Roberto, A., Sari, Y. D., & Vidyarini, T. N. (2018). Strategi Komunikasi Humas PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk Cabang Surabaya – Gempol Dalam Menyosialisasikan Sistem Pembayaran Elektronik. *JURNAL E-KOMUNIKASI*, 6, 2–12. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/8265>
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi - Konsep Dan Aplikasi* (10th ed.). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA .
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.